

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Rencana belanja daerah ialah alasan perencanaan moneter yang pada pelaksanaannya diselesaikan untuk urusan pemerintahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana dan penggunaan belanja daerah menjadi rincian pembayaran dan konsumsi teritorial dalam satu tahun yang meliputi dari bagian-bagian yang berbeda seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta cadangan penyesuaian yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU, dll yang menggabungkan penggunaan yang berbeda seperti konsumsi modal..

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian dari suatu daerah yang dapat diketahui dari peningkatan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencakup pertambahan pendapatan masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi ialah Pendapatan daerah. Apabila pendapatan daerah meningkat, pemerintah provinsi akan meningkatkan belanja daerah untuk meningkatkan dan menyelesaikan fondasi dan kerangka untuk mewujudkan ekonomi unggulan di kabupaten.

Mengingat PP No. 71 Tahun 2010, masuk akal bahwa penggunaan dirasakan ketika kewajiban muncul, pada saat penggunaan sumber daya, atau ketika keuntungan finansial atau administrasi mungkin berkurang. konsumsi yang berbeda, dll. Pengeluaran yang besar menjadi tolak ukur dalam menentukan seberapa besar pembangunan kantor dan kerangka kerja. Kami melihat bahwasanya di Provinsi Sumatera Utara belanja modal besar tetapi masih berkurangnya infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya dalam pergerakan barang antar daerah khususnya di wilayah terpencil yang mengalami keterbatasan jalan.

APBD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. APBD adalah sumber utama dalam pengalokasian Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2017 bagian ini memberikan kontribusi sebesar 79,9%. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih tergantung pada dana pemerintah pusat guna mendanai pembangunan di daerah, sehingga kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mengelola APBD dengan baik untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada daerah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan APBD termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. APBD berkurang sebesar 40% pengurangan tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) serta transfer daerah juga berkurang. Sedangkan untuk belanja modal mengalami peningkatan terutama di bidang kesehatan, bantuan sosial dan usaha kecil menengah, hal tersebut terjadi dikarenakan dampak dari Covid 19 yang mengakibatkan dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum dialihkan untuk penanganan covid 19. Yang mengakibatkan bahwasanya

program yang telah direncanakan menjadi terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan.

Untuk memiliki pilihan untuk mencapai hasil yang paling ekstrim dalam memperluas Belanja Modal, Pemerintah Daerah harus memiliki pilihan untuk mendistribusikan rencana belanja konsumsi modal secara tepat mengingat penggunaan modal ialah sebuah sarana untuk Pemerintah Daerah guna menawarkan yang terbaik. bantuan kepada masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang peneliti bertujuan untuk menguji **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten|Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Eksplorasi Made Ari serta Ni Putu Santi (2018) menunjukkan adanya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi PAD, makin tinggi penggunaan modal yang akan ditugaskan oleh legislatif terdekat. merakit kantor dan kerangka, terutama fondasi.

Penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) menunjukkan bahwa pembayaran PAD yang besar membuat pemerintah daerah memiliki pilihan untuk menutupi kebutuhan daerah, hal ini menunjukkan bahwa PAD mempengaruhi konsumsi modal. dapat mendanai latihan pemerintah dan acara pergantian lokal.

Daerah yang dapat menyandarkan PAD dalam pembangunan prasarananya sendiri disebut daerah yang mandiri.

Riset Setyawan (2018) membuktikan adanya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Hasil riset ini menyatakan jika kenaikan dana pemerintah daerah yang bersumber dari PAD sudah dimanfaatkan secara tepat guna untuk mendanai pembangunan daerah atau untuk pengoptimalan fasilitas melalui peningkatan pengalokasian Belanja Modal dalam menyediakan pelayanan untuk publik.

Berlandaskan pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan jika PAD makin tinggi akan membuat belanja modal yang diperoleh juga tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Teori Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Eksplorasi Rendy Armando (2018) merekomendasikan jika DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil eksplorasi tersebut menunjukkan jika daerah yang mendapat DAU tinggi pasti akan mendapat Belanja Modal yang besar begitupun sebaliknya.

Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) merekomendasikan bahwa DAU mempengaruhi Belanja Modal. Hasil pemeriksaan ini memperlihatkan jika makin tinggi DAU yang diberikan oleh kalangan menengah, maka makin diperhatikan juga penataan administrasi perkantoran publik melalui Belanja Modal.

Riset Dwi Anggoro (2017) membuktikan adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Hasil riset ini menyatakan jika DAU mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga tinggi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Berlandaskan pendapat ketiga ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal guna untuk pengoptimalan dalam pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Teori Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Istilah pertumbuhan keuangan diterapkan pada perekonomian yang mengalami peningkatan dalam pembayaran per kapita

Dalam buku Economic Development (2017) oleh Patta Rapanna et al, mengatakan bahwa pembangunan keuangan adalah siklus pada saat kenaikan gaji tidak dikaitkan pada laju pembangunan penduduk meskipun faktanya laju pembangunan penduduk sebagian besar terkait dengan moneter.

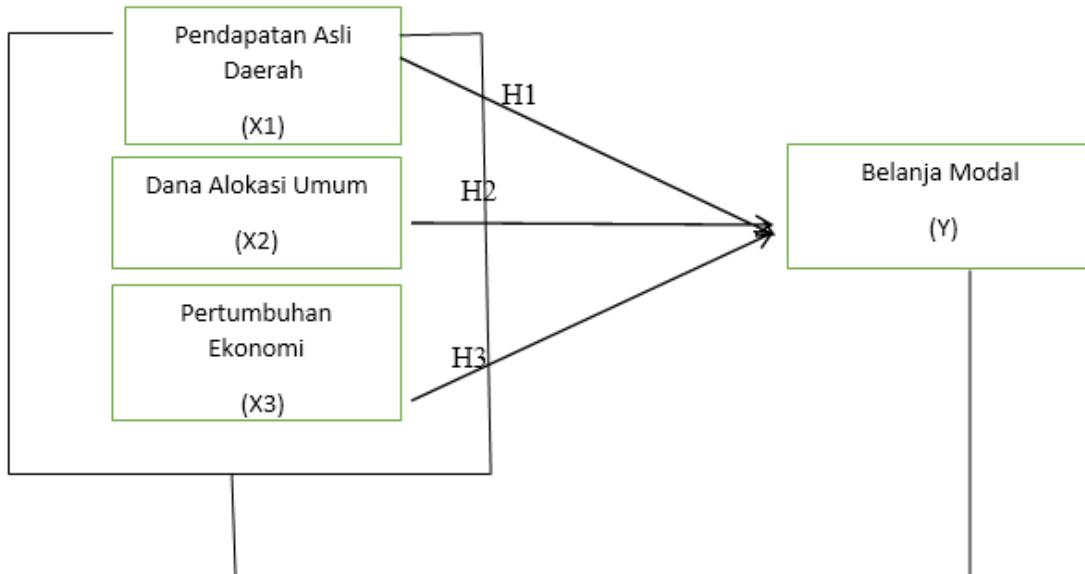
Definisi lain mengatakan bahwa pembangunan keuangan adalah perluasan pembayaran publik dalam periode tertentu, misalnya pada tahun akhir.

Menurut (Darwanto,2017) menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal guna peningkatan sarana serta prasarana suatu daerah.

Menurut peneliti pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap belanja modal pada suatu daerah,jika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka belanja modal bakal mengalami peningkatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual yang dipaparkan Sugiyono (2017:60) ialah salah satu metode untuk memahami seperti apa hubungan antara spekulasi yang dikonsentrasi dalam sebuah tinjauan. Struktur wajar pada studi ini ialah sebagai berikut:



Gambar 1.Kerangka Konseptual

Berlandaskan gagasan diatas disimpulkan dugaan penelitian ialah sebagai berikut:

H1: PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten\Kota di Provinsi Sumatera Utara

H2: DAU mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten\Kota di Provinsi Sumatera Utara

H3: Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten\Kota di Provinsi Sumatera Utara

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten\Kota di Provinsi Sumatera Utara